

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG

Masayu Rahma Wati¹, Catur Martian Fajar²

¹Fakultas Ekonomi Universitas BSI
masayu_rahmawati@rocketmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas BSI
catur.cmf@bsi.ac.id

Abstract

This study is aimed to examine the effect of local revenues are a source of the revenue government of Bandung and the balance funds to finance regional expenditure of Bandung city. The used method in this research is survey method and descriptive type verification, and analysis of data use research data in the form of reports on realization of the budget the fiscal year 2004-2015 were obtained from the department of finance and asset management of Bandung. Novelty in this study is the imitation of previous studies with some updating data. Results of correlation analysis shows the relationship of local revenue to finance regional expenditure of 0.966 with a very strong category and relationship finance regional expenditure with balancing funds amounting to 0.923 with a very strong category. The coefficient of determination shows the influence of local revenue and expenditure balance funds to the region amounted to 0.973. Partial results of hypothesis testing can be seen a significant influence variables local revenues and balancing funds to finance regional expenditure. Hypothesis test results simultaneously can be seen a significant influence between local revenues and balancing funds to finance regional expenditure in Bandung.

Keywords: District Own Source Revenue; Balancing Fund; Regional Expenditure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan asli Pemerintah Kota Bandung dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan tipe penelitian deskriptif verifikatif, dan analisis data dengan menggunakan data penelitian berupa laporan realisasi APBD selama 12 periode yaitu pada tahun anggaran 2004-2015 yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Novelty pada penelitian ini adalah imitasi dari penelitian sebelumnya dengan beberapa pembaharuan data. Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah; Dana perimbangan; Belanja daerah

*Cronicle of Article :Received (April, 2017); Revised (Mei,2017); and Published (Juni, 2017).
©2017 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*

Profile and corresponding author: Masayu Rahma Wati, SE., M.Si¹ adalah dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Sarana informatika; and Catur Martian Fajar, SE., MM² adalah dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Sarana Informatika. *Corresponding Author:* masayu_rahmawati@rocketmail.com¹ and catur.cmf@bsi.ac.id².

How to cite this article: Masayu Rahma Wati, C. M. F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76. Retrieved from <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>

PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian (Christopher, 2009). Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah yang memadai.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Mangowal, 2013). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012).

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa “dari segi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal”.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015).

Perkembangan dana perimbangan Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami

fluktuasi. Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sa'diyah & Putri (2015) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian lain yang dilakukan Panji & Indrajaya (2016) yang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Simanjuntak et al. (2013), "*Regional Original Income is a representation of the revenue generated by the regional*". Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Menurut Olubukunola (2011), "*Internally Generated Revenue (IGR) is the revenue that the local government generates within the area of its jurisdiction*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Idris (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa, "*Local Revenue (PAD) is all cash receipts into the right area recognized as an addition to net worth in one fiscal year and does not need to be paid back by the government*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2014). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya (Mahmudi, 2009).

"*Revenue generated by local government is used to finance various expenditure programmes. Expenditure is an actual payment or creation of obligation to make a future payment for some benefits items or service received*" (Abba et al. 2015), menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai rencana pengeluaran. Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang diterima.

Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, "Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif

antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah”.

Dana Perimbangan

Nasution (2015) menjelaskan bahwa, *“Regional bottom aid is a source of revenue comes from the budget to support the implementation of local authorities in achieving the objective of granting regional autonomy which is primarily done by an increase better in services and public welfare”*. Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sari, *et al.* (2014) menjelaskan bahwa *“Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi”*.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Capkova & Roncakova (2014) menjelaskan bahwa,

“The main mechanism for intergovernmental transfers is grants from central to local governments. A variety of unconditional (general) grant systems are in use to address vertical imbalances. Provision of conditional (specific) block grants from the centre to subnational governments aims to financing certain services, such as primary education, social services and roads. Equalisation grants are used to address horizontal imbalances between local authorities”

Berdasarkan pendapat Capkova & Roncakova (2014) mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah.

Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014).

Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (Abdullah & Halim, 2003). Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011)

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), *“Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure”*. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak *et al.* (2013), *“Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period”*. Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

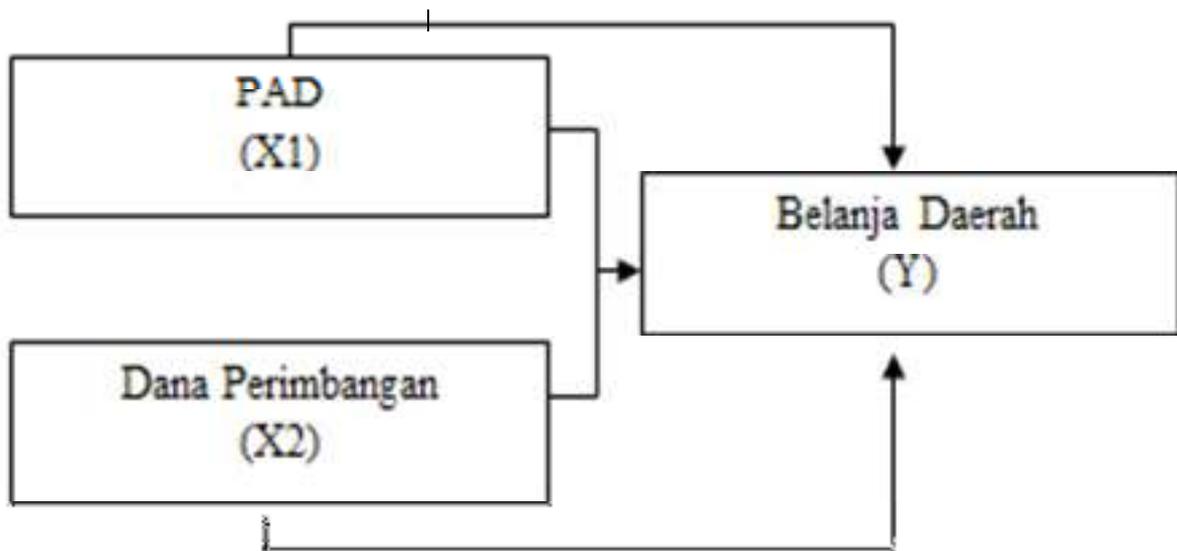
Kainde (2013) mengemukakan bahwa, *“Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”*. Belanja pemerintah daerah

sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai.

Liesionis (2013), “*Unproductive expenditure hampers economic development and inhibits its growth*”, menyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri.

“*Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This resulted in persistent fiscal deficits consequently government had to borrow from both internal and external sources*”(Abba *et al.* 2015). Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengakibatkan defisit fiskal terus-menerus akibatnya pemerintah harus meminjam dana dari sumber internal dan eksternal.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

(Gideon, *et al.* 2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa, “*Revenues from taxes, user fees and Inter governmental transfers are likely to be insufficient to meet the infrastructural needs of local authorities. For this reason, local authorities may also want to access private capital and this is achieved through such initiatives as borrowing*”.

Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.

Hipotesis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kota Bandung
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung secara simultan.

METODE PENELITIAN

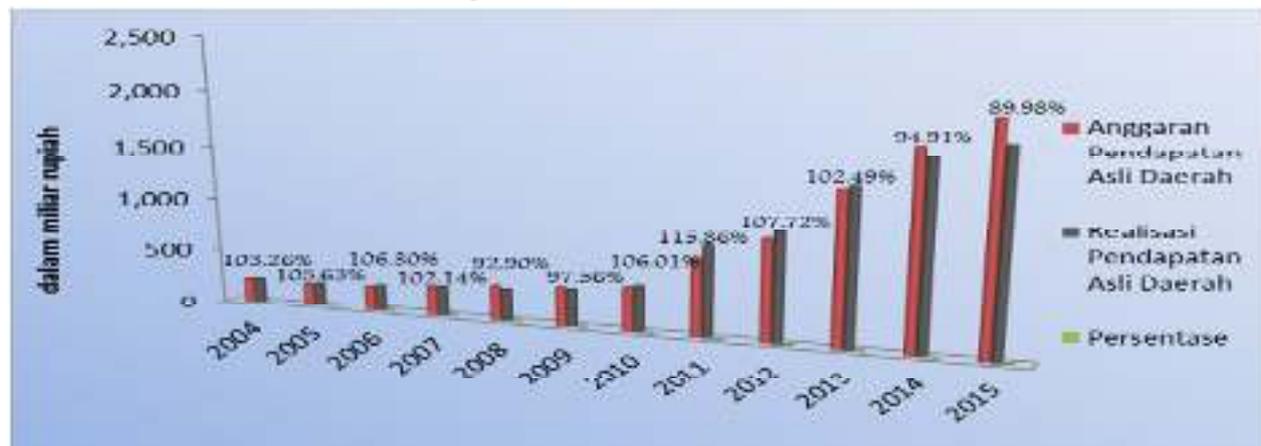
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *survey*, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung. Teknik

penarikan sampel yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung periode 2004-2015 yaitu sebanyak 12 periode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus meningkat. Berikut ini merupakan perkembangan PAD Kota Bandung.



Sumber: DPAKD Kota Bandung

Gambar 2. Perkembangan PAD Kota Bandung

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pendapatan asli daerah, kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah (Dewi, *et al.* 2014:81). Pendapatan Asli Daerah hanya mampu membiayai

belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Setyowati & Suparwati, 2012).

Ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah (Mardiasmo; basri, 2013:168). Kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah dapat dikatakan masih sangat terbatas, mengingat peranan pendapatan asli daerah yang masih rendah dalam penerimaan APBD

kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah masih sangat terbatas. Pendapatan Asli Daerah belum dapat mendorong peningkatan belanja daerah dan tidak sepenuhnya mampu menopang kemandirian daerah serta masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari itu sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan. Peningkatan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan yang diikuti peningkatan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya bangunan yang berdiri di Kota Bandung dan semakin banyak pula penduduk yang membutuhkan tempat tinggal sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga meningkat. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2004-2015.

Peningkatan penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah yaitu dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sebaliknya penurunan penerimaan retribusi daerah

disebabkan menurunnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar ketiga terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah. Contohnya penerimaan jasa giro. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terendah terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2004-2015.

Dana Perimbangan

Dana transfer atau bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berikut ini merupakan perkembangan dana perimbangan periode 2004-2015.



Sumber: DPAKD Kota Bandung

Gambar 3. Perkembangan Dana Perimbangan Kota Bandung

Peningkatan dana perimbangan disebabkan oleh meningkatnya jenis penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung. Contohnya dana alokasi umum, begitu juga sebaliknya penurunan dana perimbangan disebabkan oleh menurunnya jenis dana penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung contohnya dana alokasi khusus. Pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan dari pemerintah pusat digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan seharusnya menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.



Sumber : DPKAD Kota Bandung

Gambar 4. Perkembangan Belanja Daerah Kota Bandung

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada belanja daerah, masalah yang sering terjadi pada belanja dan anggaran belanja daerah adalah belanja pegawai yang ada dalam belanja tidak langsung, hingga mencapai lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak langsung memberikan beberapa dampak salah satunya yaitu pemborosan dibagian pegawai. Alokasi dana yang seharusnya dimaksimalkan untuk pelayanan dasar masyarakat banyak dipakai untuk membiayai belanja pegawai, akibatnya mengurangi

alokasi anggaran untuk pelayanan publik atau masyarakat.

Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, inflasi, penyesuaian faktor makro ekonomi, dan perubahan jumlah cakupan layanan. Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Belanja yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung diharapkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. Misalnya digunakan untuk pembangunan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Berikut ini adalah hasil analisis korelasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

Hasil analisis korelasi antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah adalah sebesar 0,966 dengan arah positif, hal ini membuktikan bahwa ketika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan dengan asumsi dana perimbangan dalam kondisi konstan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi

		Belanja Daerah
Pearson	Belanja Daerah	1,000
Correlation	Pendapatan Asli Daerah	,966
	Dana Perimbangan	,923
Sig. (1-tailed)	Belanja Daerah	.
	Pendapatan Asli Daerah	,000
	Dana Perimbangan	,000
N	Belanja Daerah	12
	Pendapatan Asli Daerah	12
	Dana Perimbangan	12

Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-474779448123,559	426602679320,277		-1,113	,295
Pendapatan Asli Daerah	1,470	,231	,649	6,354	,000
Dana perimbangan	1,450	,395	,375	3,668	,005

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 2, Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh sebesar 0,694 dengan arah positif terhadap belanja daerah artinya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan belanja daerah ketika dana perimbangan dalam kondisi tetap atau tidak mengalami perubahan, sehingga ketika pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan adalah sebesar $0,694 \times 100\% = 64,9\%$. Pada hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} diperoleh sebesar $6,354 > 2,228$, dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial

pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil uji t atau parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yakni (Rahmawati, *et al.* 2015) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan hasil penelitian menggunakan uji-t yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Berikut ini adalah hasil analisis korelasi dana perimbangan dan belanja daerah.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-474779448123,559	426602679320,277			-1,113	,295
Pendapatan Asli Daerah	1,470	,231	,649		6,354	,000
Dana perimbangan	1,450	,395	,375		3,668	,005

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017)

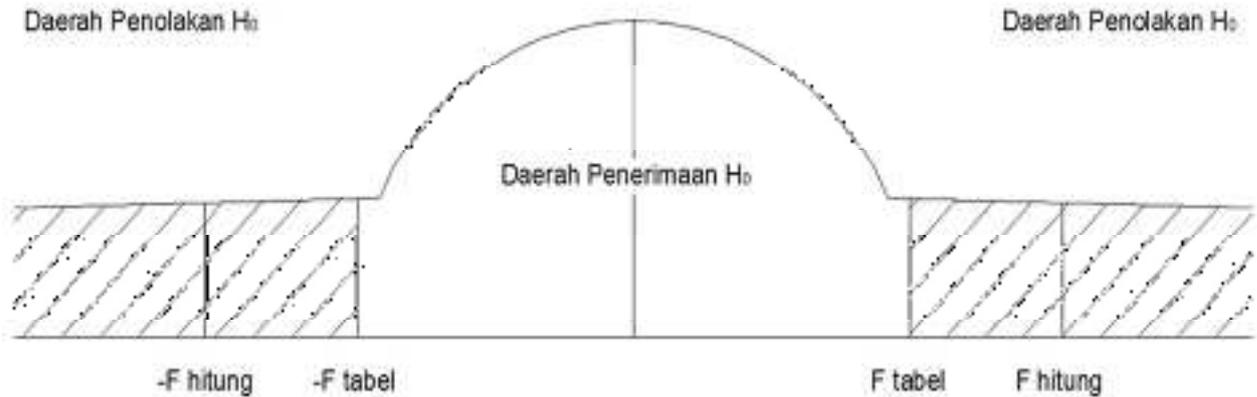
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam mengalokasikan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk digunakan dalam mendanai kebutuhan daerah yaitu belanja daerah. Jauh lebih baik menggunakan pendapatan daerah yang

berasal dari pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan kewenangan serta keleluasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah sebagai kebutuhan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah dalam kemampuan fiskal. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil uji-t atau parsial variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yakni (Sari, *et al.* 2014) yang melakukan penelitian pada Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan hasil penelitian menggunakan uji-t yaitu dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara Simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berbanding lurus terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 0,973.

Nilai *R Square* adalah sebesar 0,973 hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian.



Gambar 5. Hasil uji hipotesis secara Simultan

Berdasarkan hasil perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $162,298 > 4,256$, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hal ini membuktikan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung dengan tingkat signifikansi 0,000^b. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah maka akan semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah

Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan ditujukan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh dana perimbangan signifikan terhadap belanja daerah membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih bergantung pada pemerintah pusat, saran dari saya tingkatkan pendapatan asli daerah agar Kota Bandung menjadi kota yang tidak selalu bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sebaiknya perencanaannya lebih ditingkatkan agar jumlah belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tidak melebihi pendapatan yang diterima

Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk membangun infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah variabel lain seperti lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abba, Mohammed. Ahmed Bawa Bello & Salihu Aliyu Modibbo. (2015). *Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship : An Analysis Of Local Government In Adamawa State, Nigeria. Journal Of Arts, Science & Commere.* Vol.3 No.1 PP 67-77

Abdullah, S., & A. Halim, (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159.

Adriani & Yasa. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud.* Vol. 4 No. 11 : 1328-1356

Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.* *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.* Vol.3, No.1 : 140-149

Basri, Syafril. (2013). *Pengaruh Output Daerah Penerimaan Transfer dan Desentralisasi Fiskal terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Pekanbaru.* *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan.* Vol.3, No.8 : 165-178.

Capkova, S., Ing, D., & Roncakova, L. (2014). *Fiscal Equalization and Regional Growth, I (February),* 376-385.

Christopher, Russell Olukayade et al. (2009). *Determinants of Equity Price in the Stock Markets.* *International Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887 Issue 30 (2009). Eurojournal Publishing, Inc.

Dewi, Siska Puspita & Suyanto. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah.* *Potensio.* Vol. 20 No. 2 : 78-100.

Ferreiro, J., Garcia Del Valle, T.M., Gomez, C. (2009). *Is the composition of public*

- expenditures converging in EMU countries, Journal of Post Keynesian Economics.*
- Gideon, Zhou & Chilunjika Alouis. (2013). *The Challenges Of Self-Financing Zimbabwe. International Journal Of Humanities and Social Science.* Vol.3 No.11 PP:233-245.
- Hali, Muhammad Syafrudin. (2016). *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.* Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.1 : 65-81.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
- Idris, Irlan Fery. (2016). *Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research.* Vol.4 No.1 PP 28-42.
- Jaya, Jeckly Dharma dan Eka Ardhani Sisdyani. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9, No.2 : 285-303.
- Kainde, Christian. (2013). *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung.* Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3 : 393-400.
- Liesionis, V. (2013). *Journal of Security and Sustainability Issues* www.lka.lt/index.php/lt/217049/ The Relationship Between Government Expenditure.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Erlangga.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). *Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.* Jurnal EMBA. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Mangowal, Jessy Christine. (2013). *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.* Manado: Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 4: 1386-1396.
- Mardiasmo, (2000), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Nasution, Abdillah Arif. (2015). *The Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom Aid Model (BDB) In Nort Sumatera Province. European Journal Of Accounting Auditing And Finance Research.* Vol.3 No.2 PP 70-86.
- Olubukunola, Olusola. (2011). *Boosting Internally Generated Revenue Of Local Governments In Ogun State, Nigeria.* Vol.8 No.1 336-348.
- Panji, I Putu Barat & I Gusti Bagus Indrajaya. (2016). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.* E-Jurnal EP Unud. Vol.5 No.3 : 316-337.
- Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. (2015). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20.

- Rinaldi, Udin. (2012). *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal EKSOS, 8(2), h:105-113.
- Sa'diyah, Halimatus & Yetty Tri Putri. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.1. pp, 44-53.
- Samad, R. Putra & Rita Yani Iyan. (2013). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3 No.8 : 103-122.
- Santoso, Imam & I Wayan Suparta. (2015). *Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.4 No.2 : 135-165.
- Simanjuntak, Lestari LF., Ahmad Subeki., Ika Sasti Ferina & Hasni Yusrianty. (2013). *Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And Regional Income To Regional Expenditure Of Districts And Cities In South Sumatera. Four A Annual Conference*.
- Santoso & Rahayu. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Dinamika Pembangunan, 2(1).
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud. Vol. 3, No. 10 : 452-459.
- Sasana, Hadi. (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 18, No. 1 :46-58.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. *Prestasi*, 9(1), 113–133.